

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM

Rhimo Harvery Agustianto¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam model kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan fisik di Desa Banuayu, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi terhadap Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta representasi warga masyarakat. Dalam penelitian ini Analisis efektivitas kepemimpinan dibedah menggunakan kerangka kerja Teori Kepemimpinan Situasional oleh Hersey dan Blanchard yang diturunkan ke dalam tiga dimensi analisis utama, yaitu dimensi pengarahan, koordinasi dan komunikasi, serta pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pengarahan berjalan efektif melalui penyampaian instruksi teknis yang terstruktur sejak fase pra-konstruksi. Dimensi koordinasi dan komunikasi mampu membangun hubungan kemitraan yang sinergis antarlembaga desa serta meredam konflik horizontal melalui keterbukaan informasi. Sementara itu, dimensi pengambilan keputusan berhasil menetapkan skala prioritas pembangunan jalan setapak secara transparan melalui mekanisme musyawarah desa yang deliberatif berdasarkan kriteria kedaruratan ekonomi masyarakat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa fleksibilitas gaya kepemimpinan Kepala Desa yang situasional, partisipatif, dan kolegal menjadi faktor penggerak utama (prime mover) keberhasilan realisasi infrastruktur fisik yang berdampak domino pada peningkatan mobilitas, kelancaran pelayanan publik, dan penguatan kesejahteraan ekonomi warga perdesaan.

Kata Kunci: kepemimpinan kepala desa, pembangunan fisik, kepemimpinan situasional, Desa Banuayu.

Abstract

This study aims to analyze in depth the village head's leadership model in physical development in Banuayu Village, Empat Petulai Dangku District, Muara Enim Regency, and to identify its impact on local community welfare. The method used is a qualitative-descriptive approach, with data collection techniques utilizing in-depth interviews, field observations, and documentation analysis involving the Village Head, village apparatus, the Village Consultative Body (BPD), and community representatives. The

analysis of leadership effectiveness is examined using the framework of Hersey and Blanchard's Situational Leadership Theory, which is operationalized into three main analytical dimensions: directing, coordinating and communicating, and decision-making. The results indicate that the directing dimension operates effectively through structured technical instructions delivered since the pre-construction phase. The coordinating and communicating dimension successfully establishes a synergistic partnership between village institutions and mitigates horizontal conflicts through public information transparency. Meanwhile, the decision-making dimension succeeds in determining the scale of priority for footpath construction transparently through deliberative village meeting mechanisms based on the community's economic urgency criteria. The study concludes that the flexibility of the Village Head's situational, participatory, and collegial leadership style serves as the prime mover for successful physical infrastructure realization, creating a multiplier effect on enhancing mobility, smooth public service delivery, and strengthening rural community economic welfare.

Keywords: village head leadership, physical development, situational leadership, Banuayu Village.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan pilar determinan dalam dinamika administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, baik di tingkat makro maupun mikro. Secara teoretis, kepemimpinan diartikan sebagai seni dan kemampuan mengarahkan, memengaruhi, memotivasi, serta mengawasi orang lain guna menyelesaikan tugas-tugas terencana demi mencapai tujuan bersama (Fahmi, 2016). Sebagai organisasi pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan basis sosial masyarakat, eksistensi desa kini dituntut untuk bergeser dari yang semula menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan menjadi subjek aktif dalam koridor partisipasi lokal (Setiawan, 2022). Lahirnya paradigma desentralisasi ini menandai penguatan otonomi di mana desa memiliki kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui skema perencanaan yang akuntabel (Sulaiman, 2020). Guna merealisasikan kemandirian lokal tersebut, implementasi gaya kepemimpinan yang profesional, adaptif, dan responsif dari seorang Kepala Desa mutlak diperlukan (Zaharuddin, 2021).

Dalam struktur tata kelola pemerintahan desa, Kepala Desa memegang kedudukan sentral sebagai pimpinan eksekutif tertinggi sekaligus manajer pembangunan. Kepala Desa dibekali kewenangan atributif yang kuat untuk mengarahkan seluruh potensi desa melalui program kerja yang terintegrasi (Tokan & Gai, 2020). Salah satu indikator paling kasatmata dalam menilai keberhasilan kinerja kepemimpinan ini tercermin pada intensitas dan

kualitas pembangunan fisik. Pembangunan fisik berupa pengadaan sarana dan prasarana transportasi pada dasarnya menjadi stimulus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan biaya logistik pertanian, meningkatkan aksesibilitas layanan dasar, serta memperkuat integrasi sosiologis warga perdesaan (Ansori, 2018).

Namun demikian, pembangunan fisik di tingkat desa tidak dapat dijalankan secara searah ataupun menggunakan pendekatan koersif. Kepala Desa dituntut bertindak sebagai katalisator swadaya yang mampu memobilisasi partisipasi aktif masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan lapangan, hingga pengelolaan pasca-proyek (Putra & Rahmawati, 2022). Sebagai administrator utama, Kepala Desa bertanggung jawab penuh dalam mensinergikan kinerja perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur kelembagaan lokal lainnya agar program kerja berjalan secara transparan dan akuntabel (Larasati & Setiawan, 2022). Fenomena kepemimpinan ini menjadi sangat relevan dan urgen untuk diteliti di Desa Banuayu, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim. Sebagai salah satu desa dengan potensi agraria yang berkembang, Pemerintah Desa Banuayu secara konsisten mengalokasikan porsi signifikan dari Dana Desa untuk membiayai program pembangunan infrastruktur jalan setapak secara swakelola.

Realisasi anggaran pembangunan fisik di Desa Banuayu diarahkan untuk membuka akses kantong-kantong produksi pertanian serta mempermudah mobilitas harian warga di wilayah dusun yang sebelumnya terisolasi saat musim penghujan. Berdasarkan dokumen administratif pemerintahan desa, rincian realisasi alokasi anggaran pembangunan fisik jalan setapak di Desa Banuayu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pembanguna Fisik di Desa Banuayu

No.	PEMBANGUNAN FISIK	DANA PEMBANGUNAN
1	Rehap total jalan setapak dusun 3 sepanjang 100 meter	Rp. 55.000.000

2	Pembangunan jalan setapak arah kebun Benuang	Rp. 45.000.000
3	Pembangunan jalan setapak arah/antara lebung bojok	Rp. 110.000.000

Sumber: Data olahan, 2025

Dengan total akumulasi anggaran mencapai Rp210.000.000 pada tahun berjalan, Kepala Desa Banuayu dihadapkan pada tanggung jawab manajerial yang kompleks. Kepala Desa dituntut untuk mengoptimalkan pengawasan mutu material beton, memastikan akuntabilitas pencatatan nota keuangan, serta menekan risiko konflik horizontal dalam penentuan rute jalan (Sari, 2023). Seluruh proses ini harus dikoordinasikan secara formal melalui mekanisme musyawarah bersama BPD dengan senantiasa menyelaraskan arah kebijakan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Ramadhan, 2024).

Meskipun alokasi anggaran infrastruktur jalan setapak di Desa Banuayu tergolong besar, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih dihadapkan pada tantangan manajerial. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Kepala Desa mengoptimalkan pengawasan kualitas fisik proyek swakelola, meminimalkan potensi konflik horizontal rute jalan, serta menyelaraskan komunikasi antarlembaga agar partisipasi swadaya masyarakat tetap terjaga di tengah kompleksitas pengelolaan anggaran Dana Desa yang dinamis.

Mengingat kompleksitas tugas tersebut, keberhasilan pembangunan fisik di Desa Banuayu tidak terlepas dari karakteristik kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa. Guna membedah efektivitas kepemimpinan tersebut secara ilmiah, penelitian ini mengadopsi kerangka kerja Teori Kepemimpinan Situasional (*Situational Leadership Theory*) yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard (dalam Harsey & Blanchard, 2017). Teori ini mengemukakan bahwa tidak ada satu pun gaya

kepemimpinan yang mutlak terbaik dalam segala situasi; kepemimpinan yang efektif ditentukan oleh kemampuan pemimpin mendiagnosis tingkat kesiapan bawahan serta dinamika lingkungan sekitar (Pratama, 2021).

Landasan teori ini diturunkan ke dalam tiga dimensi analisis utama: pertama, dimensi pengarahan (*directing*) yang menitikberatkan pada kejelasan pemberian instruksi kerja, pembagian tugas teknis, dan pengawasan operasional swakelola; kedua, dimensi koordinasi dan komunikasi (*coordinating and communicating*) yang mengukur kemampuan membangun hubungan sinergis, keterbukaan informasi, dan harmonisasi kerja antarlembaga desa (Wahyudi, 2021); ketiga, dimensi pengambilan keputusan (*decision-making*) yang menakar tingkat partisipasi warga, transparansi anggaran, serta ketegasan penyelesaian kendala di lapangan (Apriyanto, 2020).

Berdasarkan latar belakang dan landasan teoretis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam model kepemimpinan Kepala Desa Banuayu dalam pelaksanaan program pembangunan fisik jalan setapak, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap penguatan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Kajian ilmiah komprehensif ini dituangkan ke dalam naskah dengan judul: “KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU MUARA ENIM”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti berniat untuk mengeksplorasi dan memahami secara komprehensif suatu fenomena sosial dalam kondisi objek yang alamiah (*naturalistic setting*), di mana peneliti memposisikan diri sebagai instrumen kunci (*human instrument*) untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2020). Melalui pemanfaatan metode deskriptif kualitatif, data yang dihimpun dari lapangan dipaparkan dalam bentuk narasi kalimat yang kaya, kutipan transkrip wawancara yang autentik, serta dokumentasi visual, alih-alih mereduksinya ke dalam deretan angka statistik atau generalisasi populasi numerik yang

kaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Moleong (2014) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi.

Secara operasional, karakteristik metodologis dalam studi kualitatif ini dicirikan oleh beberapa pilar fundamental. Pertama, pengumpulan data dilakukan secara langsung pada sumber data utama (*first-hand data*) guna menangkap konteks ruang dan waktu secara utuh. Kedua, instrumen utama dalam menyaring, menginterpretasikan, dan menganalisis data berada sepenuhnya pada diri peneliti sendiri melalui kepekaan teoretis (*theoretical sensitivity*). Ketiga, proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, dimulai dari pencatatan fakta-fakta spesifik di lapangan Desa Banuayu yang kemudian diabstraksikan menjadi tema-tema konseptual mengenai gaya kepemimpinan situasional. Keempat, penelitian ini memprioritaskan pendalaman terhadap aspek proses kerja manajerial yang diperagakan Kepala Desa sehari-hari, dibandingkan sekadar mengukur output fisik bangunan (Sugiyono, 2016).

Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) di Desa Banuayu, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, dengan pertimbangan dinamika realisasi program pembangunan jalan setapak swakelola yang cukup masif di wilayah tersebut. Penentuan informan penelitian didasarkan pada teknik *purposive sampling* untuk menjangkau subjek yang dianggap paling memahami informasi (*key informants*) terkait tata kelola desa. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Banuayu (sebagai subjek utama), Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), serta perwakilan tokoh masyarakat dan warga setempat selaku penerima manfaat langsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yang menggabungkan tiga metode utama: wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang semi-terstruktur, observasi partisipatif pasif pada lokasi pembangunan fisik dan forum musyawarah, serta studi dokumentasi (notulen rapat, RPJM Desa, daftar hadir, laporan pertanggungjawaban anggaran, dan foto lapangan). Keabsahan data diuji menggunakan teknik

triangulasi sumber (membandingkan keterangan Kepala Desa dengan data BPD dan warga) serta triangulasi metode (memverifikasi hasil wawancara dengan fakta empiris hasil observasi lapangan). Proses analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas tiga tahapan simultan: reduksi data (pemilahan, pemfokusan, dan penyederhanaan data draf kasar lapangan), penyajian data (*data display* dalam bentuk teks naratif dan matriks), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*).

PEMBAHASAN

A. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik

Kepemimpinan Kepala Desa merupakan faktor penggerak utama (*prime mover*) yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu agenda pembangunan fisik di tingkat perdesaan. Pola kepemimpinan yang efektif tidak hanya diukur dari kemampuan administratif di balik meja kerja, melainkan dari sejauh mana seorang pimpinan mampu mengarahkan proyek konstruksi secara efisien, mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang terbatas, serta menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) di kalangan warga masyarakat.

Berdasarkan perspektif teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard, efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada fleksibilitas pemimpin dalam membaca kematangan para bawahan dan warga, kemudian menyesuaikan perilaku tugas (*task behavior*) dan perilaku hubungan (*relationship behavior*) secara seimbang (Rivai & Mulyadi, 2012). Di Desa Banuayu, karakteristik kepemimpinan tersebut dibedah melalui tiga dimensi pokok: pengarahan, koordinasi dan komunikasi, serta pengambilan keputusan.

B. Dimensi Pengarahan dalam Pembangunan Fisik

Dimensi pengarahan mengindikasikan kapasitas pemimpin dalam memberikan panduan operasional, menetapkan standar kualitas bangunan, serta mengawasi pembagian tugas teknis secara berjenjang. Berdasarkan temuan di lapangan, fungsi pengarahan di Desa Banuayu tidak dilakukan secara mendadak atau parsial, melainkan telah terstruktur sejak tahap pra-

konstruksi melalui penyampaian target, jadwal, dan standar kualitas secara rinci kepada perangkat desa serta tokoh masyarakat sebelum proyek dimulai (Kepala Desa, wawancara 2025).

Pola ini linier dengan teori Hersey dan Blanchard mengenai perilaku tugas tinggi, di mana pada fase awal kegiatan, pemimpin wajib memberikan struktur kerja yang ketat agar tim pelaksana tidak kehilangan arah (Rivai & Mulyadi, 2012). Hasil observasi peneliti mengonfirmasi bahwa pengarahan formal tersebut diaktualisasikan melalui rapat persiapan konstruksi di kantor desa yang dihadiri oleh jajaran perangkat desa dan TPK, di mana dokumen teknis RKP Desa dibahas secara transparan sebagai rujukan kerja bersama.

Namun, dinamika di lapangan selalu menghadirkan tantangan yang tidak terduga. Konfirmasi dari pihak BPD menunjukkan bahwa kendati pengarahan awal sudah terbuka melalui forum resmi, instruksi makro tersebut terkadang masih memerlukan penjabaran yang lebih rinci agar dapat diimplementasikan secara teknis-mikro oleh pekerja di lapangan (Ketua BPD, wawancara 2025). Celah komunikasi (*communication gap*) minor ini diupayakan selesai melalui inspeksi mendadak (sidak) secara berkala oleh Kepala Desa ke lokasi pengecoran jalan setapak guna memberikan arahan taktis langsung kepada mandor dan pekerja, meskipun agenda pengarahan teknis lanjutan selama proses konstruksi belum dijadwalkan secara periodik dan tertulis.

C. Dimensi Koordinasi dan Komunikasi

Dimensi koordinasi dan komunikasi berperan sebagai instrumen integratif guna menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda di tengah masyarakat, sekaligus menyatukan gerak langkah antarlembaga internal desa. Tanpa adanya jaringan komunikasi yang harmonis, proyek pembangunan fisik rentan didera isu miring, kecurigaan korupsi, hingga penolakan dari warga.

Berdasarkan hasil penelitian, pola koordinasi antarlembaga berjalan dengan intensitas yang tinggi dan dilandasi semangat kemitraan, di mana Kepala Desa mengajak perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga untuk membahas setiap tahapan pembangunan (Ketua BPD,

wawancara 2025). Temuan kualitatif ini mengindikasikan adanya pergeseran gaya kepemimpinan dari yang semula bersifat instruktif menuju gaya kepemimpinan partisipatif (*participating*). Kepala Desa menempatkan BPD bukan sebagai oposisi pemerintahan, melainkan sebagai mitra sejajar dalam koridor pengawasan operasional.

Interaksi langsung antara Kepala Desa dan masyarakat di lapangan terbukti memperkuat hubungan sosial serta meningkatkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah desa (Masyarakat Desa, wawancara 2025). Komitmen koordinasi ini terdokumentasi secara valid melalui ketersediaan berita acara rapat, daftar kehadiran musyawarah yang inklusif, serta laporan sirkulasi anggaran bulanan. Kepala Desa juga responsif memanfaatkan grup pesan instan digital (*WhatsApp*) bersama para Kepala Dusun untuk memantau pasokan material agar tidak terjadi keterlambatan. Kendala klasik berupa keterbatasan kehadiran sebagian warga yang berprofesi sebagai petani karet pada forum siang hari disiasati dengan strategi perluasan saluran komunikasi alternatif melalui papan pengumuman dan wacana rembug dusun pada malam hari.

D. Dimensi Pengambilan Keputusan

Dimensi pengambilan keputusan merupakan muara dari otoritas kepemimpinan Kepala Desa yang menuntut kearifan dalam menyeimbangkan antara keterbatasan alokasi Dana Desa dan tingginya ekspektasi pembangunan dari masyarakat. Proses pengambilan keputusan yang inklusif akan memperkuat legitimasi kebijakan kepemimpinan desa, sedangkan proses yang sepihak akan melahirkan resistensi sosial.

- Lokus Internal: Kepala Desa Banuayu menerapkan prinsip kepemimpinan kolegial, di mana fungsi kontrol dan masukan dari para Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) diakomodir secara proporsional berdasarkan data riil tingkat kerusakan wilayah (Kepala Desa, wawancara 2025; Sekretaris Desa, wawancara 2025).
- Lokus Eksternal: Pada forum Musrenbangdes, Kepala Desa mampu mengarahkan jalannya perdebatan sengit antar-perwakilan dusun secara demokratis. Keputusan penetapan titik proyek jalan setapak

diambil berdasarkan kriteria kedaruratan ekonomi, yaitu mendahulukan jalan yang menjadi jalur utama pengangkutan hasil panen karet warga.

Melalui mekanisme deliberatif ini, Kepala Desa memposisikan dirinya sebagai fasilitator dan menunjukkan kapasitas kepemimpinan situasional tipe *selling* dan *participating*, di mana ia mampu meyakinkan warga dusun lain yang usulannya ditangguhkan untuk bersabar dan menjamin alokasi anggaran pada tahun berikutnya (Rivai & Mulyadi, 2012). Ketegasan situasional juga ditunjukkan saat terjadi kendala teknis berupa klaim tanah pembatas oleh salah satu warga di rute Lebung Bojok, di mana Kepala Desa mengambil keputusan cepat dengan turun langsung melakukan mediasi kekeluargaan hingga warga tersebut bersedia menghibahkan sebagian kecil tanahnya tanpa ganti rugi demi kelancaran pembangunan umum.

E. Analisis Dampak Pembangunan Fisik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan kepemimpinan situasional yang diperagakan oleh Kepala Desa Banuayu dalam mengawal pembangunan tiga titik jalan setapak memberikan dampak domino (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap potret sosio-ekonomi masyarakat desa. Sebelum adanya pembangunan dan rehabilitasi jalan setapak ini, kondisi akses mobilitas warga di Dusun 3 dan kawasan Lebung Bojok berupa tanah merah yang labil, yang pada musim penghujan berubah menjadi kubangan lumpur sehingga melumpuhkan aktivitas pertanian dan memutus akses sekolah anak-anak desa.

Pasca-selesaiannya pembangunan jalan setapak beton tersebut, terjadi transformasi yang drastis. Berdasarkan analisis data, waktu tempuh para petani karet dari area permukiman menuju kebun berkurang hingga separuhnya. Kelancaran akses ini secara langsung menurunkan biaya angkut komoditas karet, meningkatkan nilai tawar petani di hadapan tengkulak, dan mempercepat sirkulasi perdagangan di tingkat lokal. Selain dampak ekonomi, infrastruktur jalan yang kokoh ini memberikan rasa aman, menekan angka kecelakaan kerja petani, serta memastikan pelayanan

ambulans desa dapat menjangkau rumah warga dalam kondisi darurat medis secara cepat.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat Kepemimpinan

Dalam mengartikulasikan gaya kepemimpinan situasionalnya, kinerja Kepala Desa Banuayu dipengaruhi oleh interaksi faktor pendukung internal-eksternal serta hambatan struktural-kondisional di lapangan.

1. Faktor Pendukung: Akselerasi pembangunan fisik jalan setapak di Desa Banuayu ditopang oleh beberapa faktor keunggulan utama. Pertama, karakteristik kepemimpinan Kepala Desa yang aktif, komunikatif, dan memiliki kedekatan emosional dengan warga menjadi modal utama dalam mencairkan kebakuan birokrasi dan memantik partisipasi swadaya. Kedua, kematangan dokumen perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa) yang disusun secara partisipatif dan tepat waktu membuat arah pembangunan menjadi konsisten dan terukur. Ketiga, kepastian sirkulasi dan dukungan pagu anggaran Dana Desa yang ditransfer secara reguler dari pemerintah pusat memberikan kepastian pembiayaan proyek. Keempat, tingginya semangat gotong royong dan kesadaran swadaya masyarakat Desa Banuayu yang masih terjaga secara kultural, terbukti dari kerelaan warga membantu menyediakan konsumsi secara sukarela bagi para pekerja bangunan serta menjaga keamanan material proyek di lingkungan mereka.
2. Faktor Penghambat: Di sisi lain, Kepala Desa Banuayu juga dihadapkan pada sederet hambatan yang menuntut kecakapan adaptasi kepemimpinan yang tinggi. Hambatan utama bersumber dari faktor alam berupa intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah Muara Enim, yang seringkali menghentikan proses pengecoran beton di lapangan dan berisiko merusak kualitas semen yang belum kering sempurna. Hambatan kedua adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal, baik di tingkat perangkat desa maupun TPK, dalam menguasai aspek teknik sipil dan pelaporan administrasi keuangan digital yang semakin rumit, sehingga memperlambat proses penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hambatan ketiga adalah

keterbatasan pagu anggaran desa yang harus dibagi untuk membiayai sektor penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting, sehingga belum mampu mengakomodir seluruh usulan perbaikan infrastruktur fisik yang diajukan oleh masyarakat dalam waktu bersamaan. Hambatan keempat mencakup kendala waktu kehadiran fisik warga berprofesi petani pada forum koordinasi siang hari akibat kesibukan di kebun perkebunan karet mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan fisik di Desa Banuayu telah berjalan dengan baik dan efektif melalui penerapan model kepemimpinan situasional yang adaptif. Sebagai jawaban atas fokus penelitian, efektivitas tersebut tercermin dari dimensi pengarahan yang berjalan sistematis sejak tahap pra-konstruksi melalui forum resmi dan instruksi lapangan, meskipun konsistensi pengarahan berkala selama proses konstruksi masih memerlukan penguatan. Selain itu, dimensi koordinasi dan komunikasi terbukti berjalan terbuka melalui pola hubungan dua arah antarlembaga desa yang berhasil meminimalkan konflik sosial dan mendorong partisipasi publik, kendati strategi perluasan jangkauan informasi bagi warga yang berhalangan hadir masih perlu ditingkatkan. Pada dimensi pengambilan keputusan, Kepala Desa mampu mengedepankan prinsip musyawarah yang partisipatif, transparan, dan berjenjang, sekaligus menunjukkan ketegasan taktis dalam memecahkan kendala darurat di lapangan berdasarkan skala prioritas kebutuhan ekonomi warga. Rangkaian pola kepemimpinan ini berdampak langsung pada keberhasilan realisasi pembangunan infrastruktur jalan setapak yang secara konkret mampu meningkatkan mobilitas, menurunkan biaya angkut komoditas, serta mempercepat sirkulasi perekonomian lokal. Keberlanjutan hasil pembangunan ini turut didukung oleh pengawasan bersama yang menumbuhkan rasa memiliki di kalangan warga, walaupun dalam implementasinya pemerintah desa masih harus beradaptasi secara dinamis dengan beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan pagu anggaran,

dinamika kapasitas sumber daya manusia lokal, dan tantangan cuaca di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. (2018). *Pembangunan desa: Teori dan praktik*. Pustaka Ilmu.
- Apriyanto, R. (2020). *Manajemen kepemimpinan dan organisasi modern*. Pustaka Ilmu.
- Busro, M. (2018). *Teori-teori manajemen sumber daya manusia*. Prenadamedia Group.
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen kepemimpinan: Teori dan aplikasi*. Alfabeta.
- Fathoni, M. (2016). Gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 120–135.
- Hardani. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Harsey, P., & Blanchard, K. (2017). Gaya kepemimpinan situasional. Dalam V. Rivai & D. Mulyadi, *Kepemimpinan dan perilaku organisasi* (Edisi ke-3). Rajawali Pers.
- Hidayat, R., & Saputra, A. (2021). Efektivitas koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 8(1), 45–58.
- Lahada, G. (2020). Kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 11(1), 1–10.
- Larasati, M., & Setiawan, B. (2022). Akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan fisik sarana transportasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(2), 112–126.
- Martoyo, M., & Arifin, A. (2020). Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. *PublikA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 45–58.
- Ningsih, S. W. (2023). Dampak sosiologis pembangunan jalan setapak terhadap interaksi ekonomi warga perdesaan. *Jurnal Sosial Kultural*, 5(2), 89–102.

- Pratama, D. A. (2021). Implementasi kepemimpinan situasional dalam manajemen konflik pembangunan desa. *Jurnal Kepemimpinan Publik*, 4(1), 23–36.
- Putra, A. P., & Rahmawati, E. (2022). Komunikasi partisipatif kepala desa dalam menggalang swadaya masyarakat. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 6(3), 175–188.
- Ramadhan, F. (2024). Analisis pengambilan keputusan kolegal dalam musyawarah rencana pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 67–80.
- Sari, D. P. (2023). Hambatan cuaca dan kapasitas SDM dalam eksekusi proyek dana desa. *Jurnal Teknik Sipil dan Infrastruktur Perdesaan*, 3(2), 41–53.
- Setiana, A. (2022). *Gaya kepemimpinan dalam organisasi*. Prenada Media.
- Setiawan, A. (2022). *Pemerintahan desa (Partisipasi dalam pembangunan desa)*. Deepublish.
- Siregar, H. (2021). Transparansi informasi publik melalui media digital dan papan pengumuman di tingkat desa. *Jurnal Keterbukaan Informasi*, 7(2), 130–144.
- Sulaiman, T. (2020). Pola hubungan kerja badan permusyawaratan desa dan kepala desa dalam fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum Pemerintahan*, 14(2), 210–225.
- Tobing, L. (2022). Multiplier effect pembangunan jalan desa terhadap aksesibilitas layanan kesehatan darurat. *Jurnal Kesejahteraan Masyarakat*, 10(3), 150–163.
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). Studi tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangan desa menuju kemandirian desa di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 90–108.
- Utomo, P. (2023). Dinamika mediasi lahan dalam proyek infrastruktur desa secara kekeluargaan. *Jurnal Konflik dan Resolusi Sosial*, 5(1), 12–25.
- Wahyudi, M. (2021). Fleksibilitas kepemimpinan situasional kepala desa pada masa transisi anggaran. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(2), 94–107.

Zaharuddin, M. (2021). *Kepemimpinan dan manajemen organisasi*. Prenadamedia Group.